



CONSILIUM : Journal Education and Counseling

P-ISSN : [2775-9465]

E-ISSN : [2776-1223]

RELEVANSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN TERHADAP REFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK DI KOTA MALANG

Mohammad Nasir¹⁾ Wahyu Sudrajad²⁾ Supriadi³⁾ Shellya Tanaya Dhayinta⁴⁾
Dedi Dores⁵⁾

Universitas Kristen Cipta Wacana

Coressponding Author: mohammadnasir@cwcu.ac.id, wahyusudrajad@cwcu.ac.id,
supriadi@cwcu.ac.id, shellyatanaya@cwcu.ac.id, dedidores@cwcu.ac.id

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan menganalisis relevansi Pendidikan Kewarganegaraan terhadap reformasi administrasi publik di Kota Malang, dengan fokus pada dimensi nilai, etika, dan kesadaran kewarganegaraan aparatur negara. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif-empiris melalui studi kepustakaan, analisis dokumen kebijakan, serta wawancara mendalam dengan aparatur sipil negara dan akademisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi administrasi publik di Kota Malang masih didominasi oleh pendekatan struktural dan teknokratis sementara integrasi nilai-nilai kewarganegaraan dalam pembinaan aparatur belum dilakukan secara sistematis. Pendidikan Kewarganegaraan terbukti memiliki peran penting sebagai fondasi normatif dalam membentuk etika pelayanan, tanggung jawab publik, dan orientasi aparatur terhadap kepentingan masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan reformasi administrasi publik memerlukan integrasi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia aparatur guna mewujudkan birokrasi yang demokratis, berintegritas, dan berkelanjutan.

Kata kunci: Pendidikan Kewarganegaraan; Reformasi Administrasi Publik; Etika Publik; Kesadaran Kewarganegaraan; Birokrasi

Abstract:

This study examines the relevance of Civic Education to public administration reform in Malang City, focusing on the dimensions of values, ethics, and civic awareness among public officials. The research adopts a qualitative approach with a normative empirical method, employing literature review, policy document analysis, and in-depth interviews with civil servants and academics. The findings indicate that public administration reform in Indonesia remains predominantly structural and technocratic, while the integration of civic values into the development of public officials has not been systematically implemented. Civic Education plays a crucial role as a normative foundation in shaping public service ethics, public responsibility, and officials' orientation toward citizens' interests. This study highlights the importance of integrating Civic Education into public administration reform strategies to strengthen human resource development and promote a democratic, ethical, and sustainable bureaucracy.

Keywords: Civic Education, Public Administration Reform, Public Ethics, Civic Awareness, Bureaucracy.

Pendahuluan

Reformasi administrasi publik merupakan agenda fundamental dalam pembangunan tata kelola pemerintahan modern di Kota Malang. Reformasi ini diarahkan untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan Masyarakat (Handraini et al., 2024). Sejak era reformasi, pemerintah Kota Malang telah meluncurkan berbagai kebijakan reformasi birokrasi yang bertujuan memperbaiki kinerja administrasi publik, baik melalui restrukturisasi kelembagaan, penyederhanaan prosedur, maupun pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik (Manik et al., 2021).

Capaian reformasi administrasi publik di Kota Malang masih menunjukkan sejumlah keterbatasan. Berbagai kajian menegaskan bahwa reformasi birokrasi kerap terjebak pada perubahan administratif yang bersifat formal dan prosedural, sementara transformasi nilai, etika, dan perilaku aparatur negara berjalan relatif lambat (Nurdin, 2016). Fenomena rendahnya integritas aparatur, lemahnya orientasi pelayanan publik, serta masih kuatnya praktik birokrasi yang kurang responsif menunjukkan bahwa reformasi administrasi publik belum sepenuhnya menyentuh dimensi substantif yang berkaitan dengan kesadaran moral dan kewarganegaraan aparatur (Prayogi et al., 2025).

Pendidikan Kewarganegaraan menjadi aspek yang relevan untuk dikaji lebih mendalam. Pendidikan Kewarganegaraan secara konseptual bertujuan membentuk warga negara yang memiliki pemahaman konstitusional, komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi, serta kesadaran akan hak dan kewajiban dalam kehidupan bernegara (Kadji, 2022). Nilai-nilai tersebut sejatinya selaras dengan prinsip-prinsip reformasi administrasi publik, khususnya dalam membangun birokrasi yang berorientasi pada kepentingan publik, menjunjung etika pelayanan, dan menghormati hak-hak warga negara.

Pendidikan Kewarganegaraan dalam praktik kebijakan dan akademik di Kota Malang masih lebih banyak diposisikan sebagai instrumen pendidikan formal yang ditujukan bagi peserta didik di sekolah dan perguruan tinggi. Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk karakter dan perilaku aparatur publik relatif kurang mendapat perhatian. Padahal, aparatur negara pada hakikatnya adalah warga negara yang menjalankan mandat konstitusional untuk mengelola kepentingan publik. Oleh karena itu, kesadaran kewarganegaraan aparatur menjadi faktor kunci dalam menentukan kualitas penyelenggaraan administrasi publik (Johara, 2025).

Sejumlah studi menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi administrasi publik tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan dan sistem kelembagaan, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia aparatur, khususnya dalam hal etika, integritas, dan orientasi pelayanan publik (Mukmin & Sihaloho, 2024). Dalam hal ini, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki potensi strategis untuk menjadi fondasi normatif dalam membangun budaya administrasi publik yang demokratis dan berorientasi pada kepentingan warga negara. Pendidikan Kewarganegaraan dapat berperan sebagai sarana

internalisasi nilai-nilai Pancasila, konstitusionalisme, serta tanggung jawab moral aparatur dalam menjalankan fungsi pelayanan publik (Nazmi et al., 2025).

Kajian mengenai reformasi administrasi publik di Kota Malang selama ini lebih banyak berfokus pada aspek struktural, manajerial, dan kebijakan kelembagaan. Penelitian-penelitian tersebut menekankan isu seperti good governance, reformasi birokrasi, manajemen kinerja, dan digitalisasi pelayanan publik (Sahi, 2024). Di sisi lain, kajian Pendidikan Kewarganegaraan umumnya diarahkan pada pembentukan karakter warga negara, partisipasi politik, serta penguatan nilai demokrasi dalam masyarakat (Maryudi et al., 2022).

Kesenjangan penelitian (research gap) muncul ketika kedua bidang kajian tersebut jarang diintegrasikan secara sistematis. Masih terbatas penelitian yang secara khusus menganalisis relevansi Pendidikan Kewarganegaraan terhadap reformasi administrasi publik, terutama dalam konteks internalisasi nilai kewarganegaraan di kalangan aparatur negara. Selain itu, terdapat inkonsistensi dalam temuan penelitian terdahulu mengenai faktor kunci keberhasilan reformasi administrasi publik. Sebagian penelitian menekankan pentingnya regulasi dan sistem, sementara penelitian lain menunjukkan bahwa perubahan perilaku aparatur merupakan faktor paling menentukan namun paling sulit diwujudkan (Fahmi et al., 2024). Minimnya kajian yang mengaitkan perubahan perilaku aparatur dengan peran Pendidikan Kewarganegaraan menunjukkan adanya celah teoretis dan empiris yang signifikan.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memperluas paradigma reformasi administrasi publik agar tidak hanya berorientasi pada aspek teknis dan struktural, tetapi juga pada dimensi nilai dan kesadaran kewarganegaraan. Penelitian ini penting untuk menegaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dapat berfungsi sebagai instrumen strategis dalam membangun aparatur negara yang tidak hanya kompeten secara administratif, tetapi juga berintegritas, beretika, dan memiliki orientasi pelayanan publik yang kuat. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perumusan kebijakan pengembangan sumber daya manusia aparatur negara, khususnya dalam integrasi nilai-nilai Pendidikan Kewarganegaraan ke dalam sistem pendidikan dan pelatihan aparatur. Secara akademik, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian interdisipliner antara Pendidikan Kewarganegaraan dan administrasi publik, yang selama ini masih relatif terbatas dalam literatur ilmiah nasional.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis (Fikri et al., 2025). Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai relevansi Pendidikan Kewarganegaraan terhadap reformasi administrasi publik, khususnya dalam dimensi nilai, etika, dan kesadaran kewarganegaraan aparatur negara. Secara metodologis, penelitian ini mengombinasikan pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji konsep dan prinsip Pendidikan Kewarganegaraan serta reformasi administrasi publik berdasarkan

teori dan kebijakan. Pendekatan empiris digunakan untuk memahami bagaimana nilai-nilai tersebut direfleksikan dalam praktik administrasi public (Samekto, 2019). Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan, analisis dokumen kebijakan serta wawancara mendalam dengan aparatur sipil negara dan akademisi. Analisis data dilakukan secara tematik dengan mengaitkan temuan empiris pada kerangka teori yang digunakan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode (Sudrajad, 2025). Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai relevansi Pendidikan Kewarganegaraan terhadap reformasi administrasi publik di Kota Malang, sekaligus menawarkan kontribusi konseptual dan praktis dalam penguatan reformasi birokrasi berbasis nilai kewarganegaraan.

Hasil Dan Pembahasan

Hasil analisis data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, penelaahan dokumen kebijakan, serta wawancara mendalam dengan aparatur sipil negara dan akademisi, penelitian ini menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki keterkaitan yang kuat dengan proses reformasi administrasi publik di Kota Malang (Santika, 2022). Keterkaitan tersebut tidak selalu tampak secara eksplisit dalam rumusan kebijakan reformasi birokrasi, namun tercermin secara substantif dalam dimensi nilai, etika, dan kesadaran kewarganegaraan aparatur negara. Temuan ini mengindikasikan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan berperan sebagai fondasi normatif yang bekerja secara implisit dalam praktik administrasi publik, meskipun belum terlembagakan secara sistematis dalam kebijakan reformasi birokrasi.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan reformasi administrasi publik di Kota Malang hingga saat ini masih didominasi oleh pendekatan struktural dan teknokratis. Upaya reformasi lebih banyak diarahkan pada penyederhanaan prosedur, penataan kelembagaan, peningkatan kinerja berbasis indikator administratif, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik. Pendekatan ini memang memberikan dampak pada efisiensi dan keteraturan sistem administrasi namun belum sepenuhnya menyentuh aspek pembentukan karakter dan kesadaran aparatur sebagai warga negara. Akibatnya, reformasi birokrasi cenderung berjalan secara administratif dan formalistik, tanpa diikuti oleh perubahan perilaku aparatur yang berorientasi kuat pada kepentingan publik.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar aparatur memahami reformasi administrasi publik sebagai upaya perbaikan sistem, prosedur, dan kinerja pelayanan. Reformasi birokrasi dipersepsikan terutama dalam konteks digitalisasi layanan, penyederhanaan alur administrasi, dan peningkatan efisiensi kerja. Seorang informan menyampaikan:

“Selama ini reformasi birokrasi lebih kami pahami sebagai penyesuaian sistem kerja dan penggunaan aplikasi pelayanan. Fokusnya bagaimana pelayanan lebih cepat dan

*tertib secara administratif.”
(Informan A, ASN struktural)*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa reformasi administrasi publik masih dipahami secara teknokratis. Dimensi nilai dan kesadaran kewarganegaraan belum secara eksplisit menjadi bagian dari pemahaman aparatur mengenai reformasi birokrasi. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pendidikan Kewarganegaraan menunjukkan kesesuaian yang erat dengan prinsip-prinsip dasar reformasi administrasi publik. Nilai seperti kesadaran konstitusional, tanggung jawab publik, keadilan, serta komitmen terhadap kepentingan umum merupakan elemen fundamental yang seharusnya melekat pada praktik birokrasi modern. Aparatur yang memiliki pemahaman kewarganegaraan yang baik cenderung menunjukkan sikap profesional, responsif, serta menjunjung tinggi etika dalam menjalankan tugas pelayanan publik.

Temuan ini menegaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki potensi besar sebagai sumber nilai dalam membentuk orientasi dan perilaku aparatur negara. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai Pendidikan Kewarganegaraan belum dilakukan secara terstruktur dalam sistem pembinaan aparatur. Pendidikan Kewarganegaraan masih dipahami secara dominan sebagai bagian dari pendidikan formal di sekolah dan perguruan tinggi, dan belum diposisikan sebagai komponen strategis dalam pengembangan sumber daya manusia aparatur negara. Kondisi ini menyebabkan aparatur publik menjalankan tugas administratif lebih sebagai kewajiban prosedural, tanpa refleksi yang mendalam mengenai tanggung jawab kewarganegaraan dan mandat konstitusional yang melekat pada perannya sebagai penyelenggara negara.

Temuan penting dari wawancara adalah bahwa Pendidikan Kewarganegaraan jarang dikaitkan secara langsung dengan praktik administrasi publik. Sebagian aparatur menganggap Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran atau mata kuliah formal yang relevansinya terbatas pada pendidikan dasar dan tinggi. Hal ini tercermin dari pernyataan informan berikut:

*“Pendidikan Kewarganegaraan itu lebih ke pelajaran sekolah. Dalam pelatihan ASN, yang banyak ditekankan justru aturan, SOP, dan target kinerja.”
(Informan B, ASN fungsional)*

Ketika didalami lebih lanjut, informan menyadari bahwa nilai-nilai yang diajarkan dalam Pendidikan Kewarganegaraan sebenarnya berkaitan erat dengan tugas mereka sebagai aparatur negara. Kesadaran tentang hak warga negara, keadilan, dan tanggung jawab publik dianggap penting dalam pelayanan.

“Kalau bicara nilai seperti keadilan, melayani masyarakat, itu memang sejalan dengan tugas kami. Hanya saja tidak pernah disebut sebagai bagian dari Pendidikan

*Kewarganegaraan.”
(Informan A, ASN Struktural)*

Temuan ini menunjukkan adanya relevansi substantif tetapi tidak terlembagakan antara Pendidikan Kewarganegaraan dan reformasi administrasi publik. Kesenjangan antara nilai ideal yang diusung oleh Pendidikan Kewarganegaraan dan realitas praktik birokrasi tersebut menunjukkan bahwa reformasi administrasi publik belum sepenuhnya berbasis nilai. Reformasi yang tidak disertai penguatan kesadaran kewarganegaraan berpotensi melahirkan aparatur yang patuh terhadap aturan, tetapi kurang memiliki sensitivitas etis, empati sosial, dan orientasi pelayanan publik. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menghambat terwujudnya administrasi publik yang demokratis dan berkeadilan.

Penelitian ini juga menemukan adanya hubungan yang erat antara tingkat kesadaran kewarganegaraan aparatur dengan kualitas perilaku pelayanan publik. Aparatur yang memahami hak dan kewajiban warga negara, prinsip keadilan sosial, serta nilai-nilai demokrasi cenderung memandang masyarakat sebagai subjek yang memiliki hak konstitusional. Kesadaran tersebut tercermin dalam sikap pelayanan yang lebih terbuka, komunikatif, dan berupaya memberikan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi. Sebaliknya, aparatur yang memiliki pemahaman kewarganegaraan yang rendah cenderung memandang pelayanan publik sebagai rutinitas administratif semata, sehingga pelayanan yang diberikan bersifat kaku, formalistik, dan minim empati terhadap kebutuhan masyarakat.

Hasil wawancara juga mengungkap bahwa aparatur yang memiliki pemahaman lebih kuat tentang nilai kewarganegaraan cenderung menunjukkan perilaku pelayanan publik yang lebih empatik dan responsif. Mereka memandang masyarakat bukan sekadar pengguna layanan, tetapi sebagai warga negara yang memiliki hak konstitusional. Seorang informan menjelaskan:

*“Kalau kita sadar bahwa masyarakat itu punya hak, maka kita melayani bukan karena takut aturan, tapi karena memang kewajiban moral sebagai aparatur.”
(Informan B, ASN Fungsional)*

Sebaliknya, aparatur yang memandang pelayanan publik hanya sebagai rutinitas administratif cenderung bersikap formalistik dan kurang peka terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini menguatkan temuan bahwa kesadaran kewarganegaraan berpengaruh terhadap kualitas perilaku pelayanan publik, meskipun belum diakomodasi secara sistematis dalam kebijakan reformasi birokrasi. Selain itu, penelitian ini mengungkap bahwa hingga saat ini belum terdapat kebijakan yang secara eksplisit mengintegrasikan Pendidikan Kewarganegaraan ke dalam program reformasi administrasi publik. Program pendidikan dan pelatihan aparatur lebih banyak difokuskan pada peningkatan kompetensi teknis, manajerial, dan penguasaan teknologi informasi. Aspek etika publik dan kesadaran kewarganegaraan umumnya disampaikan secara normatif, bersifat insidental,

dan belum menjadi bagian dari proses pembinaan yang berkelanjutan. Keterbatasan ini berdampak pada lemahnya transformasi budaya birokrasi, karena reformasi yang dilakukan cenderung bersifat instrumental dan kurang menyentuh dimensi ideologis serta moral aparatur.

Wawancara dengan akademisi memperkuat temuan empiris di lapangan. Informan akademisi menilai bahwa reformasi administrasi publik di Kota Malang masih bias struktural dan belum berbasis nilai secara kuat.

“Reformasi birokrasi kita terlalu fokus pada sistem dan regulasi. Padahal, perubahan paling mendasar itu ada pada kesadaran aparatur sebagai warga negara.”
(Informan C, akademisi PPKn)

Menurut informan tersebut, Pendidikan Kewarganegaraan seharusnya tidak hanya diposisikan sebagai pendidikan formal, tetapi sebagai kerangka nilai dalam pembinaan aparatur negara. Tanpa internalisasi nilai kewarganegaraan, reformasi administrasi publik berpotensi bersifat prosedural dan tidak berkelanjutan. Dalam perspektif jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi menghambat pencapaian tujuan reformasi administrasi publik yang berorientasi pada pelayanan publik dan keadilan sosial (Khansa & Prasakti, 2025). Oleh karena itu, temuan penelitian ini menegaskan perlunya rekonstruksi paradigma pembinaan aparatur negara dengan menempatkan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bagian integral dari strategi reformasi birokrasi (Ninawati et al., 2025). Pendidikan Kewarganegaraan perlu dipahami tidak sekadar sebagai transfer pengetahuan, tetapi sebagai proses internalisasi nilai yang berkelanjutan dalam praktik administrasi publik.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat dibahas bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki potensi strategis sebagai instrumen penguatan reformasi administrasi publik di Kota Malang. Reformasi birokrasi yang selama ini lebih menekankan perubahan sistem dan prosedur perlu dilengkapi dengan pendekatan berbasis nilai kewarganegaraan agar menghasilkan perubahan yang lebih substantif dan berkelanjutan (Azfirmawarman et al., 2024). Secara teoretis, temuan penelitian ini mendukung pandangan bahwa administrasi publik modern menuntut aparatur yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki kesadaran etis dan orientasi pelayanan publik (Suntara, 2022). Pendidikan Kewarganegaraan berperan penting dalam membentuk aparatur yang memahami posisinya sebagai pelaksana mandat rakyat dan pelindung hak-hak warga negara (Juliardi et al., 2025).

Pembahasan ini sekaligus mengonfirmasi adanya kesenjangan penelitian yang telah diidentifikasi sebelumnya, yaitu minimnya integrasi antara kajian Pendidikan Kewarganegaraan dan reformasi administrasi publik (Fatahillah & Hendayani, 2022). Penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan perilaku aparatur yang sering dianggap sebagai aspek paling sulit dalam reformasi birokrasi dapat dipahami dan dijelaskan melalui perspektif pendidikan nilai kewarganegaraan (Labetubun et al., 2022). Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam meningkatkan kualitas administrasi publik (Sumario et al., 2022).

Hasil dan pembahasan penelitian ini menegaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki relevansi yang kuat dalam mendukung reformasi administrasi publik di Kota Malang. Relevansi tersebut terletak pada kemampuannya membentuk kesadaran, etika, dan orientasi pelayanan aparatur negara sebagai warga negara yang bertanggung jawab (Djarmiko, 2023). Reformasi administrasi publik yang mengabaikan dimensi kewarganegaraan berisiko menghasilkan perubahan yang dangkal dan tidak berkelanjutan (Nuphanudin et al., 2024). Oleh karena itu, keberhasilan reformasi administrasi publik tidak hanya ditentukan oleh kebijakan dan system tetapi juga oleh kualitas kesadaran kewarganegaraan aparatur negara, yang dapat diperkuat melalui Pendidikan Kewarganegaraan sebagai fondasi nilai dalam penyelenggaraan pemerintahan (Sugiarto et al., 2024).

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki relevansi yang substansial dalam mendukung reformasi administrasi publik di Kota Malang, khususnya pada dimensi nilai, etika, dan kesadaran kewarganegaraan aparatur negara. Reformasi birokrasi yang selama ini lebih berorientasi pada aspek struktural dan teknokratis terbukti belum sepenuhnya mampu mendorong perubahan perilaku aparatur secara mendalam. Pendidikan Kewarganegaraan berperan sebagai fondasi normatif yang dapat memperkuat orientasi aparatur terhadap kepentingan publik, tanggung jawab konstitusional, dan etika pelayanan, meskipun perannya masih bersifat implisit dan belum terintegrasi secara sistematis dalam kebijakan reformasi birokrasi. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan reformasi administrasi publik tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan dan sistem kelembagaan, tetapi juga oleh kualitas kesadaran kewarganegaraan aparatur negara. Integrasi nilai-nilai Pendidikan Kewarganegaraan dalam pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur menjadi kebutuhan mendesak untuk mewujudkan administrasi publik yang demokratis, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan demikian, penguatan reformasi birokrasi berbasis nilai kewarganegaraan merupakan langkah strategis untuk memastikan reformasi administrasi publik berjalan secara substantif dan berkelanjutan.

Daftar Rujukan

- Azfirmawarman, D., Naldi, H., Frinaldi, A., & Magriasti, L. (2024). Analisis Demokrasi Pada Era Desentralisasi Dalam Perspektif Administrasi Publik. *Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi*, 110–117.
- Djarmiko, R. M. G. H. (2023). *New Public Service: Perspektif Pelayanan Administrasi Publik di Indonesia*. Penerbit Adab.
- Fahmi, R., Latuconsina, H., Djarmaludin, D., & Lesmana, S. J. (2024). Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan Ditinjau dari Konsep dan Permasalahan Global. *Pelita: Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 24(1), 100–109.
- Fatahillah, F., & Hendayani, S. (2022). TELAAH TEKSTUAL INSERSI ETIKA ANTI KORUPSI DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN

- KEWARGANEGARAAN DI ERA DISRUPSI TEKNOLOGI 4.0. *Journal Of Elementary School Education (Jouese)*, 2(1), 94–104.
- Fikri, M. H., Sudrajad, W., Waruwu, H. C. S., & Pramudyanto, E. (2025). “ I Went to Singapore and I Didn’t Understand their English”: A Portrait of Five International Islamic Boarding School Teachers on Global Englishes. *International Journal of English and Applied Linguistics (IJEAL)*, 5(3), 280–288.
- Handraini, H., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Naldi, H. (2024). Konsep Desentralisasi Dan Otonomi Daerah dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa Di Indonesia. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 11(2), 601–608.
- Johara, J. (2025). *Buku pendidikan kewarganegaraan 2025*.
- Juliardi, B., Pebriyenni, P., & Erningsih, E. (2025). Peranan Pendidikan Kewarganegaraan dalam Menciptakan Masyarakat Madani. *Jurnal Wawasan Nusantara*, 2(1).
- Kadji, J. (2022). Problematika Pendidikan: Menyoal Relevansi Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membentuk Karakter Generasi Muda. *Irfani*, 18(2), 97–113.
- Khansa, H. K. S., & Prasakti, A. (2025). Integrasi Literasi Hukum Digital Dalam Pendidikan Kewarganegaraan: Studi Konseptual Implementasi E-Court Untuk Penyelesaian Perkara Waris. *Pedagogik: Jurnal Pendidikan*, 20(2), 188–195.
- Labetubun, M. A. H., Titahelu, J. A. S., Mardiana, M., Ramadhan, M. S., Holle, E. S., Simbolon, N. Y., Primawati, N. H., Rahman, A., Pidada, I. B. A., & Herniwati, H. (2022). *PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (SEBAGAI PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA)*.
- Manik, T. S., Samsuri, S., & Sunarso, S. (2021). Revitalisasi Pancasila Melalui Dusun Pancasila. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 1(2), 225–234.
- Maryudi, A., Sahide, M. A. K., Daulay, M. H., Yuniati, D., Syafitri, W., Sadiyo, S., & Fisher, M. R. (2022). Holding social forestry hostage in Indonesia: Contested bureaucracy mandates and potential escape pathways. *Environmental Science & Policy*, 128, 142–153. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2021.11.013>
- Mukmin, B. A., & Sihalo, O. A. (2024). Pendidikan Kewarganegaraan Transformatif: Menuju Warga Negara Berpikir Politis. *Jurnal Transformative*, 10(2), 170–196.
- Nazmi, R., Susilowati, I., Judijanto, L., Yuliah, A., Jamurin, J., Entaresmen, R. A., Furqon, W., & Johara, J. (2025). *Pendidikan Kewarganegaraan: Kewarganegaraan yang Berbasis Hukum dan Demokrasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ninawati, M., Adawiyah, A., Nuryolanda, I., Zulkarnain, M. F., Fadhilah, S. A., & Aida, S. N. (2025). MEMBANGUN KARAKTER ANTI KORUPSI MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI SEKOLAH TINGGI. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(01), 1433–1442.
- Nuphanudin, N., Wardani, H. K., Gamaliel, F. X., Pattipeilohy, P., Ansori, A. S., & Kristiawan, M. (2024). Growing up citizens: mengintegrasikan pendidikan kewarganegaraan dan manajemen peserta didik. *Jurnal Konseling Dan Pendidikan*, 12(3), 41–55.
- Nurdin, E. S. (2016). Analisis Konten Dimensi Implementasi Kebijakan Publik pada Konten Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. *Sosiohumanika*, 9(1).

- Prayogi, A., Nasrullah, R., Setiawan, S., & Setyawan, M. A. (2025). Membaca Sejarah dalam Membangun Negara: Perspektif Historis dalam Reformasi Administrasi Publik. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 3(2), 67–78.
- Sahi, Y. (2024). PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN:(Kajian Konseptual, Perbandingan, dan Relevansinya sebagai Sarana Pendidikan Politik). *JURNAL POLAHI*, 2(3), 80–94.
- Samekto, F. X. A. (2019). Menelusuri akar pemikiran hans kelsen tentang stufenbeautheorie dalam pendekatan normatif-filosofis. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(1), 1–19.
- Santika, I. G. N. (2022). *Pendidikan Kewarganegaraan: Problematika Hasil Perubahan UUD 1945 Secara Konseptual*.
- Sudrajad, W. (2025). THE ROLE OF STUDENTS'PSYCHOLOGICAL EXPLORATION IN CONTEMPORARY LITERATURE: A STUDY OF IAN MCEWAN AND JULIAN BARNES. *Consilium: Education and Counseling Journal*, 5(2), 841–860. <https://doi.org/10.36841/consilium.v5i2.6399>
- Sugiarto, R. V., Murofikoh, D. I., & Sandi, M. (2024). PELAYANAN PUBLIK SEBAGAI INSTRUMEN PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(8), 585–591.
- Sumario, S., Riyanti, A., Daulay, M. I., Bagenda, C., Soegoto, A. S., Soeikromo, D., Kusnadi, E., Sagala, M. J. P., Heriyanto, H., & Hasibuan, A. K. H. (2022). *PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN “Hakikat, Konsep dan Urgensi.”*
- Suntara, R. A. (2022). Peran Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Hukum Bagi Warga Negara. *Scripta: Jurnal Kebijakan Publik Dan Hukum*, 2(II), 307–316.